RENCANA KERJA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAHUN 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : P.5/P2SDM/SET/REN.0/12/2019

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2020, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta mengacu pada prioritas nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195).
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2020 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2020 ini menjadi pedoman dan dasar bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ini merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2020, dan di jadikan sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Tahun 2020.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2019

KEPALA BADAN,

Ir. HELMI BASALAMAH, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Tema Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah 2020 berfokus pada Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Badan P2SDM) merupakan penjelasan atau penjabaran lebih rinci dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020.

Pendekatan penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 masih menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS). Pada tahun 2020 Pemerintah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional dimana Badan P2SDM mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui 4 (empat) kegiatan.

Dokumen ini disusun untuk mendukung tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 yang diperoleh melalui hasil-hasil diskusi dalam berbagai forum resmi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan internal Badan P2SDM.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal, jujur, integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kepala Badan P2SDM

Ir. Helmi Basalamah, MM

DAFTAR ISI

	Hal
Dasar Hukum Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2020	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi Badan P2SDM	3
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan P2SDM	4
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	6
2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	12
III. Rencana Kerja Tahun 2020	17
3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020	17
3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2020	20
3.3 Alokasi Pendanaan Badan P2SDM Tahun 2020	23
IV. Penutup	26
V. Lampiran	27
Pustaka	38

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkup Badan P2SDM 5
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Golongan 5
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 5. Sasaran Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019 6
Tabel 6. Realisasi Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM 7
Tabel 7. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2018 7
Tabel 8. Kegiatan Badan P2SDM dalam Mendukung Prioritas Nasional 9
Tabel 9. Capaian IKP BP2SDM hingga bulan November 2019 10
Tabel 10. Capaian IKK BP2SDM hingga bulan November 2019 11
Tabel 11. Capaian Diklat Kerjasama Badan P2SDM Tahun 2019 12
Tabel 12. Pagu per Kegiatan Badan P2SDM Tahun 2018 13
Tabel 13. Realisasi Anggaran per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2018 13
Tabel 14. Realisasi per Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2018 14
Tabel 15. Distribusi Alokasi Anggaran per Satker lingkup Badan P2SDM awal dan November 2019 15
Tabel 16. Capaian Badan P2SDM hingga 30 November 2019 dan Prognosis s.d. Desember 2019 16
Tabel 17. Dukungan Badan P2SDM pada Prioritas Nasional Tahun 2020 18
Tabel 18. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 1 19
Tabel 19. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 3 20
Tabel 20. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 4 20
Tabel 21. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2020 21
Tabel 22. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2020 21
Tabel 23. Target Diklat Kerjasama Badan P2SDM Tahun 2020 23
Tabel 24. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM 23
Tabel 25. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan sumber dana (dalam ribuan rupiah) 24
Tabel 26. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan jenis belanja (dalam ribuan rupiah) 24

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1. Dukungan Kementerian LHK pada Prioritas Nasional Tahun 2020 1

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3

Gambar 3. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1 17

Gambar 4. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 3 17

Gambar 5. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 4 18

Pembuatan gula aren/gula semut di LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya Provinsi Banten

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Fokus utama dalam Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) tahun 2020 adalah untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, non aparatur, lulusan sekolah vokasi, serta masyarakat dengan tetap menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, Pemerintah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yaitu **PN1**-Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, **PN2**-Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, **PN3**-Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, **PN4**-Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan **PN5**-Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berupaya mendukung pencapaian tujuan kerja Pemerintah tersebut, dimana pada Tahun 2020 KLHK berfokus pada 3 (tiga) PN yaitu PN1, PN3, dan PN4. Prioritas Nasional ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Nasional (ProPN), dan Output Kegiatan dalam Renja.

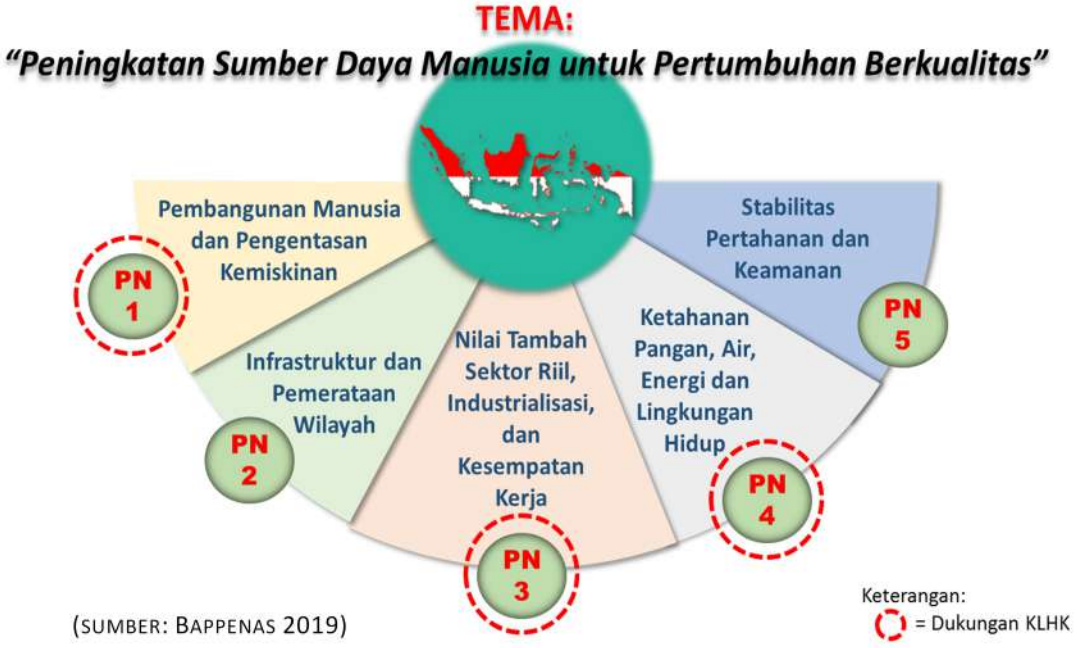

GAMBAR 1. DUKUNGAN KEMENTERIAN LHK PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa: (1) Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM); serta (2) Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan Kementerian LHK dan tujuan kerja Pemerintah tahun 2020 yang berfokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Badan P2SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga ikut berperan dalam 3 (tiga) prioritas nasional melalui 4 (empat) output kegiatan yaitu melalui: (1) fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok tani hutan (KTH) menjadi KTH mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) penyiapan pendamping yang berkompeten dalam melakukan pemberdayaan masyarakat/kelompok tani hutan; (3) penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten; serta (4) peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2020 ini merupakan penjabaran kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM untuk mewujudkan keberhasilan target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditentukan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
f. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II seperti yang tercantum pada struktur organisasi Badan P2SDM berikut (Gambar 2).

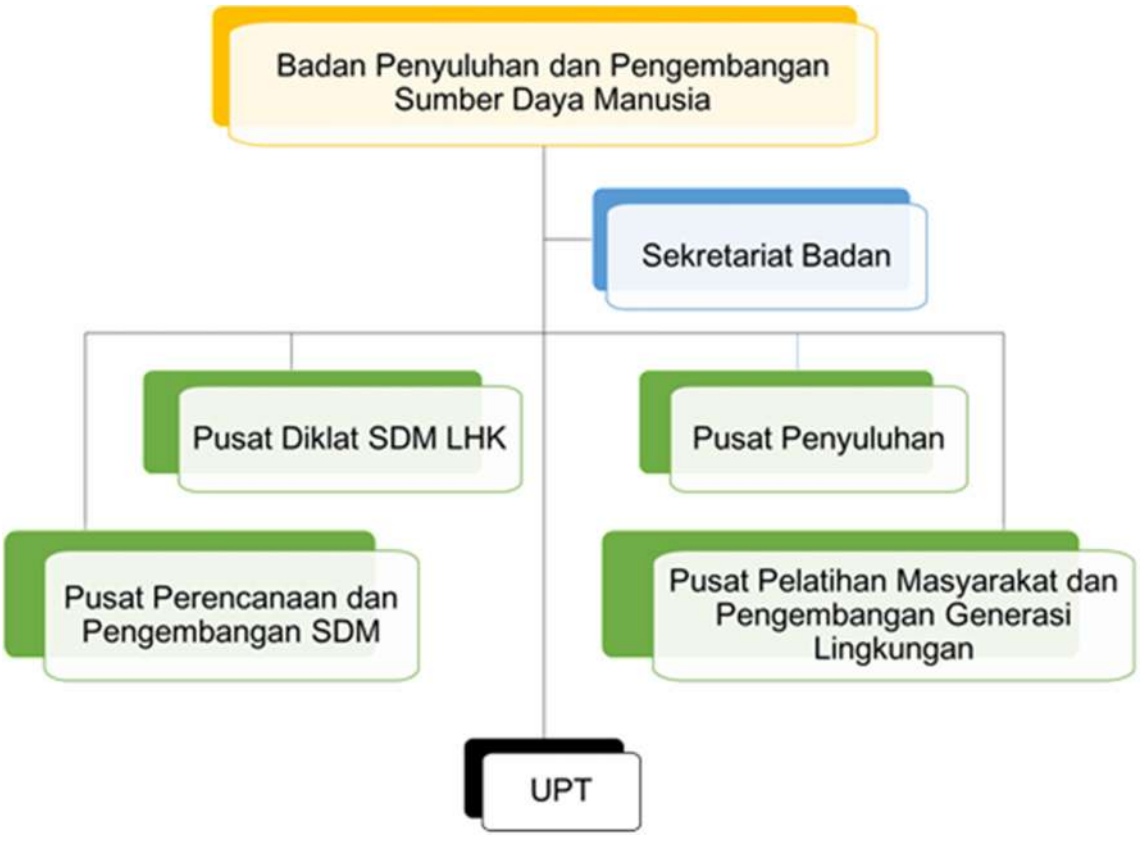

GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian LHK selain didukung oleh 5 unit eselon II juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan P2SDM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A.	***Unit Kerja Eselon II (Pusat)***		
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia
B.	***UPT Balai Diklat LHK*** *(PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)*		
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makasar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C.	***SMK Kehutanan Negeri*** *(PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)*		
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN P2SDM

Sumber daya manusia pada Badan P2SDM terdiri dari unsur pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak) yang sejumlah 1.252 orang (945 ASN dan 307 orang tenaga kontrak) secara keseluruhan tersebar

pada unit kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	5
3.	Eselon III	
	- Pusat	18
	- UPT (Balai Diklat LHK)	7
4.	Eselon IV	
	- Pusat	43
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	26
6.	Staf dan fungsional ASN	
	- Pusat	222
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	623
Jumlah ASN (1-6)		**945**
7.	PPNPN (Tenaga Kontrak)	
	- Pusat	86
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	221
Jumlah PPNPN (7)		**307**
Total Pegawai (1-7)		**1.252**

Pegawai ASN pada Badan P2SDM berjumlah 945 orang dengan rincian berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 3 dan 4 berikut.

TABEL 3. PEGAWAI ASN BADAN P2SDM BERDASARKAN GOLONGAN

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	Golongan IV	56	71	23	28	178
2	Golongan III	83	226	93	128	530
3	Golongan II	25	142	9	40	216
4	Golongan I	0	19	0	2	21
Jumlah		**164**	**458**	**125**	**198**	**945**

TABEL 4. PEGAWAI ASN BADAN P2SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	S3	12	12	6	4	34
2	S2	50	89	32	39	210
3	S1/D4	49	126	58	73	306
4	D3	11	15	16	16	58
5	SLTA/D1/D2	35	180	11	63	289
6	SLTP	4	21	1	1	27
7	SD	3	15	1	2	21
Jumlah		**164**	**458**	**125**	**198**	**945**

II. Capaian Sasaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 - 2019, program kerja Badan P2SDM adalah Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun sasaran Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019 terdapat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Sasaran Program Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2015-2019
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkat Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkat Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	• Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang. • Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH.

Berdasarkan tabel 5 diatas, sebagai *supporting unit* bagi Eselon I lainnya di Kementerian LHK, Badan P2SDM memiliki 4 (empat) target indikator kinerja program untuk mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Capaian indikator kinerja program Badan P2SDM hingga tahun 2018 tercantum pada Tabel 6. Secara umum, dapat dilihat bahwa capaian setiap tahun tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renja. Akan tetapi jika dilihat secara total capaian dalam 4 tahun terakhir dan disandingkan dengan target Renstra Badan P2SDM, baru mencapai 32,05%. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran BP2SDM yang ditetapkan selama 4 tahun tersebut tidak dapat memenuhi rencana target yang telah disusun pada Renstra Badan P2SDM.

TABEL 6. REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM

Target Indikator Kinerja Program (IKP)	Realisasi Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang.	**2.412 Orang** (107,87%) dari target 2.236 Orang	**1.224 Orang** (111,27%) dari target 1.100 Orang	**740 Orang** (104,23%) dari target 710 Orang	**1.117 Orang** (97,98%) dari target 1.140 Orang
Jumlah SDM LHK Meningkat Kapasitasnya, 57.640 orang.	**10.003 Orang** (109,19%) dari target 9.161 Orang	**4.652 Orang** (99,51%) dari target 4.675 Orang	**4.024 Orang** (99,83%) dari target 4.031 Orang	**4.066 Orang** (99,95%) dari target 4.068 Orang
Jumlah Generasi Lingkungan Meningkat Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	**9.397 Orang** (91,41%) dari target 10.280 Orang	**3.198 Orang** (82%) dari target 3.900 Orang	**2.386 Orang** (110,98%) dari target 2.150 Orang	**5.138 Orang** (103,28%) dari target 4..975 Orang
	643 Unit Sekolah/ Kampus (91,86%) dari target 700 Unit Sekolah/ Kampus	**706 Unit Sekolah/ Kampus** (100,86%) dari target 700 Unit Sekolah/ Kampus	**536 Unit Sekolah/ Kampus** (107,20%) dari target 500 Unit Sekolah/ Kampus	**396 Unit Sekolah/ Kampus** (104,21%) dari target 380 Unit Sekolah/ Kampus
Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkat Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	**345 Unit KTH** (63,07%) dari target 547 Unit KTH	**474 Unit KTH** (100,42%) dari target 472 Unit KTH	**460 Unit KTH** (100%) dari target 460 Unit KTH	**380 Unit KTH** (100,80%) dari target 377 Unit KTH

Indikator Kinerja Program tersebut dijabarkan secara lebih terperinci melalui 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen serta dijabarkan lebih lanjut melalui 17 indikator kinerja kegiatan. Adapun target dan capaian Badan P2SDM Tahun 2018 seperti yang tercantum pada Tabel 7 berikut.

TABEL 7. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2018

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018
Perencanaan dan Pengembangan SDM Sasaran: *Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten*	a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH	440 orang	417 orang
	b) Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	700 orang	700 orang

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK Sasaran: *Meningkatnya kapasitas SDM LHK*	a) Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	2.996 orang	2.996 orang
	b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3)	85 orang	85 orang
	c) Jumlah KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	4 unit KHDTK	4 unit KHDTK
	d) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang Meningkat Kapasitasnya	230 orang	230 orang
	e) Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Hutan Meningkat Kapasitasnya	300 orang	300 orang
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: *Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan*	Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan *sebanyak*	457 orang	455 orang
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Sasaran: *Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan*	a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkat Kapasitasnya	375 orang	379 orang
	b) Jumlah Generasi Muda LH Meningkat Kapasitasnya	4.100 orang	4.105 orang
	c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	380 unit sekolah/ kampus	654 unit sekolah/ kampus
	d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya LH	500 orang	396 orang
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: *Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat*	a) Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya	367 KTH	367 KTH
	b) Jumlah Koperasi KTH yang Dibentuk	10 unit	13 unit
	c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	10 unit	13 unit
	d) Jumlah Tenaga Pendamping Handal Bagi KTH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Hutan	200 orang	200 orang
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM*	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal (A)	72,00 poin	72,00 poin

2.1.2 Indikator Kinerja dan Prognosis Tahun 2019

Tahun 2019 sebagai tahun terakhir periode pembangunan jangka menengah Tahun 2015-2019 merupakan penentu nilai keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, renja tahun 2019 seyogyanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan target atau setidaknya mengoptimalkan targetnya sehingga mengindikasikan adanya akumulasi atau tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2015-2019.

Sebagaimana dipahami bahwa Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui 5 kegiatan yaitu pada (PN1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan dasar; (PN3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; serta (PN4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.

Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung PN1 sebanyak 5 kegiatan yaitu (1) pelatihan bagi generasi muda lingkungan hidup; (2) peningkatan kapasitas bagi tenaga pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH); (3) peningkatan kelas bagi KTH; (4) pembentukan koperasi; dan (5) unit percontohan bagi KTH yang berada di sekitar hutan. Kegiatan- kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat sekitar hutan dan KTH dapat memiliki usaha mandiri sehingga taraf hidup dan nilai ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih meningkat. Dukungan Badan P2SDM terhadap PN3 dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu (1) penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) dan (2) peningkatan kompetensi SDM LHK melalui uji sertifikasi dan kompetensi. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan sehingga mereka dapat langsung berkiprah atau terlibat dalam proses pembangunan kehutanan di Indonesia. Terkait PN4, Badan P2SDM mendukung melalui tiga kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas yang masing-masing memiliki 3 target masyarakat/kelompok (kader LH, generasi muda LH, anggota saka kalpataru dan saka wanabakti) agar ke depannya dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

TABEL 8. KEGIATAN BADAN P2SDM DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan
PRIORITAS NASIONAL 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan dasar		
Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	ProPN 3 – Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH
	ProPN 4 – Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnnya
		Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan
		Jumlah unit Koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)
PRIORITAS NASIONAL 3 Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya		
Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi	ProPN 3 – Pelaksanaan Diklat Vokasi	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia
Pemantapan Sertifikasi Kompetensi	ProPN 4 – Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya
PRIORITAS NASIONAL 4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air		
Pecegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	ProPN 4 – Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Jumlah kader Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya
		Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup
		Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2019 Badan P2SDM memiliki 4 Indikator Kinerja Program (IKP) dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Namun demikian pada periode pelaksanaan tahun 2019 terdapat tambahan dana insentif yang bersumber dari dana Bendahara Umum Negara (BUN) yang dicairkan pada triwulan III 2019 sehingga menyebabkan perubahan target pada beberapa indikator kegiatan. Berdasarkan hasil Laporan Bulanan Badan P2SDM periode November, capaian kinerja Badan P2SDM hingga Bulan November Tahun 2019 telah mencapai 89,76%. Beberapa kendala pencapaian kegiatan BP2SDM diantaranya adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda dan tidak sesuai rencana yang ditentukan. Secara terperinci, capaian IKP dan IKK tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10 berikut.

TABEL 9. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM (PER BULAN NOVEMBER 2019)

Target IKP 2015-2019	Target 2019	Realisasi s.d. November 2019	% Capaian
1. **Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak Dan SDM LHK Kompeten (25.400 orang).**	1.4970 orang	1.500 orang	100,20
2. **Jumlah SDM LHK Meningkat Kapasitasnya (57.640 orang).**	5.021 orang	4.332 orang	86,28
3. **Jumlah Generasi Lingkungan Meningkat Kapasitasnya (71.200 orang) dan 5.000 unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.**	2.500 orang	2.468 orang	98,72
	400 unit	0 unit	0,00
4. **Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkat Kapasitasnya (5.500 unit KTH dan Koperasi).**	130 unit	127 unit	97,69

TABEL 10. CAPAIAN IKK BADAN P2SDM (PER BULAN NOVEMBER 2019)

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi s.d. November 2019	% Capaian
1.Perencanaan Pengembangan SDM	**Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten**			
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	197 orang	197 orang	100,00
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang	1.300 orang	1.302 orang	100,23
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	**Meningkatnya kapasitas SDM LHK**			
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan non Aparatur yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	4.198 orang	3.524 orang	83,94
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang	75 orang	62 orang	82,67
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	7 unit	7 unit	91,27
	d. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang	300 orang	300 orang	100,00
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	**Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan**			
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	448 orang	446 orang	99,78
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	**Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan**			
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	360 orang	363 orang	100,83
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	1.360 orang	1.320 orang	97,05
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	400 unit	0 unit	0,00
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	780 orang	785 orang	100,64
5. Peningkatan Penyuluhan	**Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat**			
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	110 unit	110 unit	100,00
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	20 unit	17 unit	85,00
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	20 Unit	20 unit	100,00
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	200 orang	200 orang	100,00

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi s.d. November 2019	% Capaian
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi**			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	84 Poin	76,39 Poin	90,94

Dalam rangka memenuhi kebutuhan diklat bagi SDM LHK yang lebih spesifik dari UKE I lingkup KLHK atau instansi/lembaga lain, yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran DIPA Badan P2SDM, maka Satker pelaksana Diklat Badan P2SDM (Pusdiklat, BDLHK) melaksanakan mekanisme kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Pada Tahun 2019, telah dilaksanakan 165 angkatan diklat (jumlah peserta 4.419 orang) yang tersebar di 7 (tujuh) Balai Diklat LHK dan Pusdiklat SDM LHK. Rincian diklat kerjasama pada masing-masing satker seperti tercantum pada Tabel 11 berikut.

TABEL 11. KERJASAMA DIKLAT BADAN P2SDM TAHUN 2019

No.	Satker	Jenis Diklat	Realisasi Peserta (orang)			
			Jumlah Angkatan	Peserta (orang)		
				L	P	Jumlah
1	PUSDIKLAT SDM LHK	50	54	1.071	175	1.246
2	BDLHK BOGOR	11	11	306	52	358
3	BDLHK KADIPATEN	19	19	523	6	529
4	BDLHK PEMATANGSIANTAR	9	9	212	44	256
5	BDLHK PEKANBARU	18	24	726	39	765
6	BDLHK SAMARINDA	14	18	445	32	477
7	BDLHK MAKASSAR	32	29	641	132	748
8	BDLHK KUPANG	1	1	26	14	40
JUMLAH		**154**	**165**	**3.950**	**494**	**4.419**

2.2 CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

2.2.1 Serapan Anggaran Tahun 2018

Alokasi anggaran pada Tahun 2018 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp325.914.950.000,-. Alokasi pagu akhir Badan P2SDM menjadi Rp315.433.088.000. Rincian perubahan pagu dan realisasi pada masing-masing kegiatan lingkup Badan P2SDM terdapat pada Tabel berikut.

TABEL 12. PAGU PER KEGIATAN BADAN P2SDM TAHUN 2018

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Ribu Rupiah)	
		Awal	Akhir
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		**325.914.960**	**315.433.088**
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	26.736.200	26.736.200
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	124.541.205	125.419.765
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	99.297.518	100.073.018
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	18.760.000	19.242.190
5	Peningkatan Penyuluhan	10.854.600	10.854.600
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	45.725.437	33.107.315

Dari Tabel 12 di atas terlihat bahwa untuk memenuhi pengurangan pagu, komponen yang dikurangi adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sementara untuk kegiatan tidak mengalami pengurangan, bahkan mendapatkan kenaikan dari pergeseran kelebihan belanja pegawai.

Dari sisi pelaksanaan, alokasi pagu akhir anggaran tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar 97,76% dengan realisasi fisik sebesar 99,77%. Secara umum perbandingan realisasi keuangan dan fisik satker-satker lingkup Badan P2SDM relatif seimbang, terkecuali Sekretariat Badan P2SDM yang dapat merealisasikan 100% fisik dengan realisasi keuangan hanya dengan menggunakan 87,91 % dari anggaran yang disediakan.

TABEL 13. REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN LINGKUP BADAN P2SDM TAHUN 2018

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		**315.433.088.000**	**308.379.465.438**	**97,76**
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	26.736.200.000	26.732.582.181	99,99
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	125.419.765.000	124.814.426.862	99,52
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	100.073.018.000	97.908.689.259	97,84
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	19.242.190.000	18.965.124.620	98,56
5	Peningkatan Penyuluhan	10.854.600.000	10.853.254.853	99,99
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	33.107.315.000	29.105.387.663	87,91

Selanjutnya, perincian realisasi fisik dan keuangan berdasarkan Satker lingkup BP2SDM adalah sebagaimana Tabel 14 di bawah. Pada Tabel 14 terlihat bahwa secara umum, setiap satker telah mencapai tingkat realisasi yang sangat baik, yaitu rata-rata 97,76% untuk keuangan dan 99,77 % dari sisi fisik yang berarti satker telah berhasil melakukan kegiatan secara efisien bahkan melakukan inovasi sehingga tingkat realisasi fisik yang melebihi anggaraan yang disediakan. Bahkan untuk Sekretariat Badan P2SDM dapat merealisasikan 100% fisik dengan realisasi keuangan hanya dengan menggunakan 87,91% dari anggaran yang disediakan. Khusus SMKKN Manokwari, mengingat adanya sejumlah permasalahan non-teknis dengan masyarakat sekitar, dapat dipahami dan tetap diapresiasi bila tingkat serapan dan realisasi, sedikit di bawah rata-rata.

TABEL 14. REALISASI PER SATKER LINGKUP BADAN P2SDM TAHUN 2018

No.	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi		
			Rupiah	%	% Fisik
A.	**Satuan Kerja Pusat**				
1.	Sekretariat Badan P2SDM	33.107.315.000	29.105.387.663	87,91	100,00
2.	Pusat Penyuluhan	10.854.600.000	10.853.254.853	99,99	100,00
3.	Pusat Renbang SDM	26.736.200.000	26.732.583.181	99,99	100,00
4.	Pusat Diklat SDM LHK	40.477.190.000	40.298.079.858	99,56	100,00
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL	13.125.190.000	12.864.813.988	98,02	100,00
B.	**UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)**				
1.	BDLHK Bogor	14.100.000.000	13.922.572.184	98,74	100,00
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.813.000.000	11.755.009.495	99,51	99,87
3.	BDLHK Samarinda	12.671.000.000	12.652.005.385	99,85	100,00
4.	BDLHK Makassar	15.242.775.000	15.195.013.243	99,69	99,96
5.	BDLHK Pekanbaru	14.350.000.000	14.303.516.795	99,68	99,68
6.	BDLHK Kadipaten	13.157.000.000	13.050.059.926	99,19	100,00
7.	BDLHK Kupang	11.725.800.000	11.723.927.874	99,98	100,00
C.	**UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)**				
1.	SMKKN Manokwari	17.467.253.000	16.479.568.595	94,35	98,50
2.	SMKKN Kadipaten	21.394.320.000	20.965.632.772	98,00	98,07
3.	SMKKN Makassar	19.630.500.000	19.282.419.808	98,23	100,00
4.	SMKKN Samarinda	18.863.945.000	18.712.260.010	99,20	100,00
5.	SMKKN Pekanbaru	20.717.000.000	20.483.360.808	98,87	100,00
	Jumlah A + B + C	**315.433.088.000**	**308.379.465.438**	**97,76**	**99,77**

2.2.2 Serapan Anggaran dan Prognosis Tahun 2019

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2019 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp310.840.945.000,- dengan rincian per sumber dana RM sebesar Rp297.324.345.000,-; HLN sebesar Rp4.657.000.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp8.859.600.000,-. Selama tahun 2019 berjalan, terdapat beberapa kali perubahan pagu pada Badan P2SDM dikarenakan terdapat tambahan dana insentif, penerimaan revisi antarprogram dan hibah pada beberapa satuan kerja. Penambahan alokasi anggaran diarahkan untuk percepatan penyelesaian kewajiban mengikuti diklat kepemimpinan (tingkat III dan IV) bagi yang sudah menjabat serta penguatan pelaksanaan program pemerintah terkait kartu pra kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Alokasi Pagu akhir Badan P2SDM tahun 2019 menjadi Rp331.362.070.000,- dengan rincian alokasi per masing-masing satker lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

TABEL 15. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER LINGKUP BP2SDM

No.	Satuan Kerja	Pagu Awal	Pagu (November 2019)
A.	**Satuan Kerja Pusat**		
1.	Sekretariat Badan P2SDM	30.315.181.000	27.651.790.000
2.	Pusat Penyuluhan	15.205.194.000	10.765.500.000
3.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	10.919.500.000	17.937.664.000
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	13.518.940.000	62.326.918.000
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	52.554.509.000	14.933.940.000
B.	**UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)**		
1.	BDLHK Bogor	10.451.745.000	14.319.820.000
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.707.670.000	10.956.745.000
3.	BDLHK Samarinda	13.519.820.000	12.637.700.000
4.	BDLHK Makassar	21.110.600.000	16.309.118.000
5.	BDLHK Pekanbaru	11.279.300.000	13.224.541.000
6.	BDLHK Kadipaten	14.992.118.000	22.423.000.000
7.	BDLHK Kupang	10.968.850.000	12.108.850.000
C.	**UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)**		
1.	SMKKN Manokwari	18.883.635.000	15.010.425.000
2.	SMKKN Kadipaten	23.234.008.000	23.447.565.000
3.	SMKKN Makassar	17.762.551.000	19.627.718.000
4.	SMKKN Samarinda	19.491.623.000	18.632.656.000
5.	SMKKN Pekanbaru	14.925.701.000	19.048.120.000
	Jumlah A + B + C	**310.840.945.000**	**331.362.070.000**

Hingga 30 November 2019, saat dokumen ini disusun, realisasi anggaran Badan P2SDM sudah mencapai 88,16% atau sebesar Rp292.123.430.214,-, dengan realisasi fisik mencapai 89,76%. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala teknis terkait sebagai konsekuensi dari penambahan alokasi (dana insentif dan tunjangan pegawai) yang baru diterima pada pertengahan tahun 2019. Secara rinci realisasi per satuan kerja lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 16 berikut.

TABEL 16. CAPAIAN BADAN P2SDM HINGGA 30 NOVEMBER 2019 DAN PROGNOSIS S.D. DESEMBER 2019

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi s.d. November 2019			Prognosis s.d. Desember 2019	
			Rupiah	%	% Fisik	Rupiah	%
A.	**Satuan Kerja Pusat**						
1.	Sekretariat BP2SDM	27.651.790.000	24.552.557.433	88,79	90,40	27.408.454.248	99,12
2.	Pusat Penyuluhan	10.765.500.000	10.168.682.362	94,46	94,46	10.759.040.700	99,94
3.	Pusat Renbang SDM	17.937.664.000	16.502.578.574	92,00	92,28	17.925.107.635	99,93
4.	Pusat Diklat SDM LHK	62.326.918.000	52.997.399.109	85,03	85,21	61.778.441.122	99,12
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL	14.933.940.000	12.523.637.366	83,86	86,48	14.932.446.606	99,99
B.	**UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)**						
1.	BDLHK Bogor	14.319.820.000	12.905.803.645	90,13	90,18	14.315.524.054	99,97
2.	BDLHK Pematangsiantar	10.956.745.000	9.931.351.151	90,64	90,81	10.945.788.255	99,90
3.	BDLHK Samarinda	12.637.700.000	11.343.452.682	89,76	89,76	12.577.039.040	99,52
4.	BDLHK Makassar	16.309.118.000	14.264.821.780	87,47	88,21	16.203.108.733	99,35
5.	BDLHK Pekanbaru	13.224.541.000	11.911.572.137	90,07	90,07	13.180.900.015	99,67
6.	BDLHK Kadipaten	22.423.000.000	20.836.174.253	92,92	92,98	22.384.880.900	99,83
7.	BDLHK Kupang	12.108.850.000	11.237.660.368	92,81	92,81	12.077.366.990	99,74
C.	**UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)**						
1.	SMKKN Manokwari	15.010.425.000	12.474.698.154	83,11	90,13	14.525.588.273	96,77
2.	SMKKN Kadipaten	23.447.565.000	20.340.401.439	86,75	86,75	23.199.020.811	98,94
3.	SMKKN Makassar	19.627.718.000	17.100.101.477	87,12	91,50	19.401.999.243	98,85
4.	SMKKN Samarinda	18.632.656.000	16.387.537.578	87,95	88,48	18.219.011.037	97,78
5.	SMKKN Pekanbaru	19.048.120.000	16.645.000.706	87,38	98,54	18.819.542.560	98,80
	Jumlah A + B + C	**315.259.023.000**	**292.123.430.214**	**88,16**	**89,76**	**328.653.260.221**	**99,18**

III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Pada tahun 2020, pembangunan nasional menetapkan 5 prioritas nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 3 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (PN1), Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja (PN3), serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup (PN4). Sasaran utama Kementerian LHK tahun 2020 adalah meningkatkan nilai produk domestik bruto sektor hulu 5-7%, indeks lingkungan hidup 67-68.5, dan laju deforestasi 300-400 ribu/tahun. Badan P2SDM, mendukung pencapaian 14 Indikator Kinerja Kegiatan melalui 4 Program Prioritas (PP) di dalam 3 PN tersebut,yaitu:

1. PN1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan: PP4 Pengentasan Kemiskinan

GAMBAR 3. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 1

2. PN3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja: PP3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi

GAMBAR 4. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 3

3. PN4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup: PP4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup

GAMBAR 5. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 4

Pelaksanaan kegiatan Badan P2SDM pada tahun 2020 juga fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yaitu melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi baik secara formal maupun non formal. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan teknis tingkat SMKK untuk pemenuhan tenaga teknis di dunia usaha dan industri, penyiapan tenaga teknis bidang kehutanan, lingkungan hidup, ataupun tenaga pendamping Perhutanan Sosial baik melalui tenaga non aparatur ataupun masyarakat. Pengembangan SDM di bidang LHK pada gilirannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas/ekonomi.

Alokasi anggaran BP2SDM pada tahun yang khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian 3 PN dimaksud adalah sebesar Rp87.534.110.000,-. Secara rinci, dukungan alokasi anggaran Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2020 tercantum pada Tabel 17 berikut.

TABEL 17. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp)
1	**PN1 -** Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	7.300.000.000,-
2	**PN3 -** Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	74.256.350.000,-
3	**PN4 -** Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	5.977.760.000,-
TOTAL		**87.534.110.000,-**

❖ PRIORITAS NASIONAL 1

Terkait Prioritas Nasional 1 (PN1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan), Badan P2SDM yang mendukung melalui 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok tani hutan (KTH) menjadi KTH mandiri; serta (2) Penyiapan pendamping yang berkompeten dalam melakukan pemberdayaan masyarakat/kelompok tani hutan. Kegiatan ini termasuk ke dalam Program Prioritas *Pengentasan Kemiskinan (PP4)*, Kegiatan Prioritas *Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (KP4)* serta termasuk ke dalam Proyek Prioritas Nasional *Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial (ProPN7)*. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat sekitar hutan dan KTH untuk dapat memiliki usaha mandiri sehingga taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada PN1 seperti pada Gambar 3 dan Tabel 18 berikut.

TABEL 18. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 1

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Ribu Rupiah)
PP4-Pengentasan Kemiskinan	***KP4-****Reforma agraria dan perhutanan sosial*	**Pro PN-7** Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	Kelompok Tani Hutan Mandiri	4.100.000
			Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat	3.260.000
Total				**7.360.000**

❖ PRIORITAS NASIONAL 3

Dukungan BP2SDM terhadap Prioritas Nasional 3 (PN3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja) dilakukan melalui 1 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Prioritas 3 (PP3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebagaimana tahun 2019, maka pada tahun 2020 dukungan terhadap PN3 dilakukan melalui penyediaan lulusan siswa SMK Kehutanan Negeri yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti dengan memberikan diklat ganis bagi lulusan SMK Kehutanan guna mendukung program pemerintah terkait vokasi. Melalui kegiatan ini diharapkan kesempatan kerja di bidang kehutanan dapat diraih dan dijalani dengan baik oleh para lulusan. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada PN3 seperti pada Gambar 4 dan Tabel 19 berikut.

TABEL 19. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 3

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Ribu Rupiah)
PP3-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	***KP3-*** *Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi*	**Pro PN-7** Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	74.256.300
Total				**74.256.300**

❖ PRIORITAS NASIONAL 4

Pada Prioritas Nasional 4 (PN4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup), Badan P2SDM mendukung melalui 1 kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM Masyarakat yang memeiliki peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam Program Prioritas Peningkatan kualitas lingkungan hidup (PP4). Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pelatihan diberikan kepada komunitas/lembaga serta masyarakat yang fokus bergerak dalam bidang lingkungan, termasuk pembinaan kepada sekolah adiwiyata. Pelatihan yang diberikan juga kedepannya difokuskan kepada pelatihan vokasi guna mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM dan penyerapan tenaga kerja. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada PN4 seperti pada Gambar 5 dan Tabel 20 berikut.

TABEL 20. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 4

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Ribu Rupiah)
PP-4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	***KP-1*** *Pencegahan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup*	**Pro PN-4** Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	5.977.760
Total				**5.977.760**

3.2 PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Program Badan P2SDM pada tahun 2020 adalah **PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM** dengan sasaran program Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan

Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 4 (empat) target indikator kinerja program sesuai dengan Tabel 20 berikut.

TABEL 21. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2020
01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat	KHDTK yang Dikelola secara Efektif dan Berkelanjutan	7 Unit
02-Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK*	4.732 Orang
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat*	110 Unit
	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	518 orang

*Keterangan:

1. IKP Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK dihitung berdasarkan jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya; SDM yang mengikuti Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK; serta lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2. IKP Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat dihitung berdasarkan Jumlah KTH Mandiri dan Pembentukan LP2UKS

Untuk mencapai target pada IKP dan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui 14 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 21 berikut atau secara lebih terperinci target kinerja kegiatan Badan P2SDM dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Kerja ini.

TABEL 22. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2020

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Perencanaan dan Pengembangan SDM Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	a) Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, **5 Jenis Jabatan**
	b) Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, **5 Jenis Jabatan**
	c) SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya, **1.000 orang**

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a) SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, **3.260 Orang**
	b) SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa, **45 orang**
	c) Nilai KHDTK yang dikelola, **55 poin**
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang tersedia, **472 orang**
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	a) SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari, **1.530 orang**
	b) Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan, **18 unit**
	c) Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, **500 Unit**
Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	a) Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat, **200 orang**
	b) Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri, **120 KTH**
	c) Pengembangan dan Implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan, **4 Jenis**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, SAKIP dengan nilai **A poin**

Sesuai Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa ASN berhak menerima peningkatan kompetensi pegawai minimal 20 JPL/tahun. Jumlah ASN Kementerian LHK saat ini sekitar 16.221 orang. Kebutuhan diklat juga tidak hanya untuk ASN saja, tetapi juga diklat kepada kelompok tani, pendamping KTH ataupun masyarakat. Melihat hal tersebut, pemenuhan kebutuhan diklat saat ini masih belum dapat diakomodir melalui pendanaan APBN untuk seluruh kebutuhan diklat. Oleh karena itu setiap satuan kerja juga diharapkan dapat berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan diklat. Badan P2SDM menargetkan pelaksanaan diklat kerjasama pada tahun 2020 sebanyak 145 angkatan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 23. TARGET DIKLAT KERJASAMA BADAN P2SDM TAHUN 2020

No.	Satker	Target Angkatan	Target Peserta
1	PUSDIKLAT SDM LHK	40	1.200 orang
2	BDLHK BOGOR	10	300 orang
3	BDLHK KADIPATEN	20	600 orang
4	BDLHK PEMATANGSIANTAR	10	300 orang
5	BDLHK PEKANBARU	20	600 orang
6	BDLHK SAMARINDA	20	600 orang
7	BDLHK MAKASSAR	20	600 orang
8	BDLHK KUPANG	5	150 orang
JUMLAH		**145**	**4.350 orang**

3.3 ALOKASI PENDANAAN BADAN P2SDM TAHUN 2020

Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2020 didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp341.386.089.000,-.** Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

TABEL 24. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp.)
A. Unit Kerja Pusat		
1	Sekretariat Badan P2SDM	38.894.570.000
2	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	8.740.000.000
3	Pusat Penyuluhan	23.656.525.000
4	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	17.531.700.000
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	45.070.484.000
B. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)		
6	BDLHK Pematangsiantar	12.846.640.000
7	BDLHK Pekanbaru	14.543.500.000
8	BDLHK Bogor	15.827.580.000
9	BDLHK Kadipaten	14.544.040.000
10	BDLHK Samarinda	13.180.500.000
11	BDLHK Makassar	16.475.000.000
12	BDLHK Kupang	13.925.900.000
C. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)		
13	SMKKN Pekanbaru	32.131.650.000
14	SMKKN Kadipaten	20.525.000.000
15	SMKKN Samarinda	18.640.000.000
16	SMKKN Makassar	19.553.000.000
17	SMKKN Manokwari	15.300.000.000
TOTAL BP2SDM		**341.386.089.000**

Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana RM sebesar Rp316.227.830.000,-; PNBP sebesar Rp10.000.000.000,-; HLN sebesar Rp2.783.259.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp12.375.000.000,-. Adapun rincian alokasi anggaran Badan P2SDM per satker berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 25.

TABEL 25. ALOKASI ANGGARAN BADAN P2SDM BERDASARKAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

NO.	SATKER	SUMBER DANA				JUMLAH
		RM	PNBP	HLN	SBSN	
1	Sekretariat BP2SDM	38.894.570	0	0	0	38.894.570
2	Pusrenbang SDM	6.755.000	1.985.000	0	0	8.740.000
3	Pusat Penyuluhan	20.821.525	2.835.000	0	0	23.656.525
4	Pusdiklat SDM LHK	40.427.225	1.860.000	2.783.259	0	45.070.484
5	Puslatmas dan PGL	17.131.700	400.000	0	0	17.531.700
6	BDLHK Bogor	15.377.580	450.000	0	0	15.827.580
7	BDLHK Pematangsiantar	12.426.640	420.000	0	0	12.846.640
8	BDLHK Samarinda	12.775.500	405.000	0	0	13.180.500
9	BDLHK Makassar	15.995.000	480.000	0	0	16.475.000
10	BDLHK Pekanbaru	14.133.500	410.000	0	0	14.543.500
11	BDLHK Kadipaten	14.194.040	350.000	0	0	14.544.040
12	BDLHK Kupang	13.520.900	405.000	0	0	13.925.900
13	SMKKN Manokwari	15.300.000	0	0	0	15.300.000
14	SMKKN Kadipaten	20.525.000	0	0	0	20.525.000
15	SMKKN Makassar	19.553.000	0	0	0	19.553.000
16	SMKKN Samarinda	18.640.000	0	0	0	18.640.000
17	SMKKN Pekanbaru	19.756.650	0	0	12.375.000	32.131.650
Jumlah		**316.227.830**	**10.000.000**	**2.783.259**	**12.375.000**	**341.386.089**

Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian masing-masing sebesar Rp123.182.635.000,-; Rp181.855.139.000,-; dan Rp36.348.315.000,-. Adapun rincian alokasi anggaran Badan P2SDM per satker berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

TABEL 26. ALOKASI ANGGARAN BADAN P2SDM BERDASARKAN JENIS BELANJA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

NO.	SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	Sekretariat BP2SDM	23.095.935	15.505.600	293.035	38.894.570
2	Pusrenbang SDM	0	7.788.000	952.000	8.740.000
3	Pusat Penyuluhan	0	23.225.025	431.500	23.656.525
4	Pusdiklat SDM LHK	16.013.000	28.057.484	1.000.000	45.070.484
5	Puslatmas dan PGL	5.445.700	11.577.390	508.610	17.531.700

NO.	SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
6	BDLHK Bogor	8.401.000	5.926.580	1.500.000	15.827.580
7	BDLHK Pematangsiantar	6.900.000	5.246.640	700.000	12.846.640
8	BDLHK Samarinda	6.650.000	5.852.500	678.000	13.180.500
9	BDLHK Makassar	8.480.000	6.995.000	1.000.000	16.475.000
10	BDLHK Pekanbaru	7.955.000	6.052.000	536.500	14.543.500
11	BDLHK Kadipaten	7.960.000	5.584.040	1.000.000	14.544.040
12	BDLHK Kupang	7.798.000	5.777.900	350.000	13.925.900
13	SMKKN Manokwari	5.428.000	9.725.300	146.700	15.300.000
14	SMKKN Kadipaten	5.310.000	12.173.665	3.041.335	20.525.000
15	SMKKN Makassar	4.335.000	11.205.345	4.012.655	19.553.000
16	SMKKN Samarinda	3.875.000	10.640.220	4.124.780	18.640.000
17	SMKKN Pekanbaru	5.536.000	10.522.450	16.073.200	32.131.650
Jumlah		**123.182.635**	**181.855.139**	**36.348.315**	**341.386.089**

Melalui alokasi anggaran tersebut, diharapkan setiap satker dapat melaksanakan semua target yang direncanakan secara optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Anggota LP2UKS di Subang yang memiliki usaha budidaya rumput laut

Kegiatan Penanaman dengan melibatkan masyarakat dan siswa sekolah di BDLHK Bogor

IV. PENUTUP

Visi SDM Unggul Indonesia Maju yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menyiratkan bahwa kemajuan bangsa dalam berbagai hal ditentukan oleh kualitas SDM sehingga secara otomatis menjadi fokus utama pembangunan nasional di periode 5 tahun ke depan. Badan P2SDM KLHK berupaya mendukung visi tersebut dengan menyusun rencana kerja dan kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terkait SDM khususnya di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan, yaitu PN1 (Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan), PN3 (Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja), PN4 (Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup). Sesuai dengan tupoksinya Badan P2SDM berfokus pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Sebagai tahun awal periode baru RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat beberapa perubahan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan P2SDM sehingga diperlukan penyesuaian yang cepat oleh setiap satker agar tujuan pembangunan tetap dapat tercapai. Beberapa perubahan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM LHK guna mendukung keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen perencanaan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan Badan P2SDM. Dokumen ini tentunya menjadi pedoman umum bagi Satker lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam dirasakan dan dipertanggungjawabkan.

V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2020
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
I	**Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM			**165.789.655**								
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal		**A**	**poin**									
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	Layanan	25.105.830	Jakarta, Bogor, Serpong, Pekanbaru, Pematangsiantar, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Kupang							
	Layanan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Badan P2SDM				9.120.055								
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				2.271.780								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				2.270.385								
	c. Pengelolaan kepegawaian				2.533.925								
	d. Pelayanan umum dan perlengkapan				2.043.965								
	Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM				547.650								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				131.600								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				234.480								
	c. Pelayanan umum dan perlengkapan				181.570								
	Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK				882.980								
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				252.434								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				274905								
	c. Pengelolaan kepegawaian				247.541								
	d. Pelayanan umum dan perlengkapan				108.100								
	Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan				539.130								
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				236.670								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				89.730								
	c. Pengelolaan kepegawaian				118.430								
	d. Pelayanan umum dan perlengkapan				94.300								
	Layanan Dukungan Manajemen pada Pusat Penyuluhan				12.705.525								
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				367.000								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				838.525								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	c. Pelayanan umum dan perlengkapan				11.500.000								
	Layanan Dukungan Manajemen pada Balai Diklat LHK				1.310.490								
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				366.510								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				149.660								
	c. Pengelolaan kepegawaian				379.685								
	d. Pelayanan umum dan perlengkapan				414.635								
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1	layanan	8.949.645	Jakarta, Bogor, Serpong, Pekanbaru, Pematangsiantar, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Kupang							
	Tanpa Sub Output				8.949.645								
	a. Pengadaan perangkat pengolah data dan Ikomunikasi				105.500								
	b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				3.960.545								
	c. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				4.883.600								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	131.734.180	Jakarta, Bogor, Serpong, Pekanbaru, Pematangsiantar, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	a. Gaji dan Tunjangan				19.795.294								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				3.419.947								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
II	**Perencanaan dan Pengembangan SDM**	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten			**7.240.350**								
1.	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK		**5**	**Jenis Jabatan**									
	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK				1.470.175	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pengembangan SDM Aparatur LHK				1.470.175								
2.	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK		**5**	**Jenis Jabatan**									
	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK				1.720.175	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	b. Pengembangan SDM Non Aparatur LHK				1.720.175								
3.	SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya		**1.000**	**Orang**									
	SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya				4.050.000	Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, DKI Jakarta								
	Tanpa Sub Output												
	a. Uji Kompetensu/Sertifikasi SDM LHK				2.300.000								
	b. Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK				1.750.000								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
III	**Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK**	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan			**36.542.324**								
1.	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya		**3.260**	**orang**									
	SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya				28.112.324	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	a. Diklat Teknis dan Fungsional				18.236.799								
	b. Diklat Administrasi				4.183.200								
	c. Diklat Kepemimpinan				660.481								
	d. Pendukung Kediklatan				5.031.844								
2.	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa		**45**	**orang**									
	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa				4.500.000	Pusdiklat SDM LHK							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pendidikan program S2 dalam negeri				3.055.000								
	b. Pendidikan program S3 dalam negeri				620.000								
	c. Pengelolaan pendidikan lanjutan				825.000								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
3.	Nilai KHDTK yang dikelola		**55**	**poin**									
	NIlai KHDTK yang dikelola				3.678.660	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan				3.678.660								
IV	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan**	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan			**109.375.000**								
1.	tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia		**472**	**orang**									
	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia				74.256.350	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari	KP-3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	PP-3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	PN-3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja				
	Tanpa Sub Output												
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan				51.360.897								
	b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008				227.000								
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan				9.864.335								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	d. Publikasi pendidikan				234.098								
	e. Kerjasama pendidikan				195.000								
	f. Proyek Pembangunan Komplek SMK Kehutanan Negeri				12.375.000								
	Layanan Perkantoran		1	Layanan	35.118.650	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari							
	Tanpa Sub Output												
	a. Gaji dan Tunjangan				24.484.000								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				10.634.650								
V	**Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan**	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup			**11.919.260**								
1.	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari		**1.530**	**orang**			KP-1 Pencegahan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	PP-4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PN-4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup				
	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari				5.977.760	Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, NTT, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan				5.767.760								
	b. Dukungan Pelatihan				210.000								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
2.	Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan		**18**	**unit**									
	Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan				3.630.000	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pelaksanaan gerakan masyarakat bela lingkungan				2.586.600								
	b. Penyelenggaraan ekspos generasi lingkungan				90.000								
	c. Pelaksanaan krida saka kalpataru dan wanabakti				757.400								
	d. Dukungan pengembangan generasi lingkungan				196.000								
3.	Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)		**500**	**unit**									
	Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)				2.311.500	Seluruh Indonesia							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pembinaan sekolah adiwiyata				1.268.000								
	b. Penilaian/evaluasi sekolah adiwiyata				833.500								
	c. Dukungan manajemen pelaksanaan adiwiyata				210.000								
VI	**Peningkatan Penyuluhan**	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			**10.519.500**								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
1.	Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat		**200**	**Orang**									
	Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/ Kelompok Masyarakat				3.200.000	Wilayah Jabalnusra, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua	KP-4 Reforma agraria dan perhutanan sosial	PP-4 Pengentasan Kemiskinan	PN-1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan				
	Tanpa Sub Output												
	a. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan menjadi kompeten (penyuluh handal)				2.000.000								
	b. Ketenagaan penyuluhan non aparatur				1.200.000								
2.	Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Mandiri		**120**	**KTH**									
	Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri				4.100.000	Aceh, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sulut, Sultra, Sumbar, Banten, Bali, Kalsel, Sumut, Riau, Babel, Kepri, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Kaltim, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	KP-4 Reforma agraria dan perhutanan sosial	PP-4 Pengentasan Kemiskinan	PN-1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan				
	Tanpa Sub Output												
	a. Fasilitasi kegiatan peningkatan kelola kelembagaan, kawasan dan usaha				4.100.000								

No.	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
3.	Pengembangan dan Implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan		**4**	**jenis**									
	Metode penyuluh kehutanan yang diimplementasikan				3.219.500	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan				3.219.500								

PUSTAKA

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
2. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
3. Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2018;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan P2SDM Bulan November Tahun 2019

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2020

Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 14,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Gun Gun Hidayat,
Agus Setyawan, Dita Haristyaningrum, Rizky Dwi Harsanti,
Anandita Irianti Utami dan Dede Rohman

Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Foto dari berbagai kondisi existing kegiatan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Gedung Manggala Wanabakti Blok. I Lantai 14
Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Email: setbp2sdm@menlhk.go.id/badanppsdmk@gmail.com
Telp. (021) 5730131, Fax. (021) 5730131